

PERAN PEMERINTAH DESA SELAKU STABILISATOR DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

Nissya Amelia¹, Lina Marliani², Etih Henriyani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : nissyaamelia025@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Peran Pemerintah Desa Selaku Stabilisator dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hal ini dikarena Pemerintah Desa kurang memberikan perhatian kepada kelompok tani seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi yang mengakibatkan kelompok tani tidak berkembang sesuai yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Selaku Stabilisator dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Desa Selaku Stabilisator dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal dikarenakan Pemerintah Desa kurang memonitoring dan koordinasi dalam hal perencanaan program maka dari itu peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun kelompok tani sebagai bentuk modal sosial dibidang pertanian terhadap pembangunan desa, biaya yang terbatas mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang dilaksanakan, serta Pemerintah Desa yang kurang responsip terhadap kegiatan kelompok tani seperti pembinaan dan sosialisasi karena pada dasarnya pembinaan dan sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan potensi pertanian karena sangat diperlukan oleh kelompok tani dan kelompok tani bisa lebih paham dalam mengembangkan potensi pertanian.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Stabilisator, Pengembanhhan Kelompok Tani.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberlangsungan roda kehidupan masyarakat di Desa, karena Pemerintah Desa menjadi pemangku kepentingan yang mengatur masyarakatnya. Pada

dasarnya Pemerintah Desa menjadi aktor utama dalam setiap kegiatan dengan menjalankan hak dan kewajibannya untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Peran merupakan segala aktifitas atau kegiatan, perilaku dan tingkah

laku yang teratur dengan cara tertentu untuk menjalankan hak dan kewajibannya yang mengarah pada perubahan kemajuan serta harapan masyarakat atas orang yang menduduki status tertentu. Pada dasarnya setiap Pemerintah Desa mempunyai kedudukan dan peranan yang paling tinggi di Desa yang berhak memainkan perannya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Desa.

Sesuai dengan yang dikatakan Riyadi (2002:138) yang mengartikan Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari sebagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang mendukung pembimbing dan mendukung fungsinya dengan mengorganisasi. Peran yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Menurut Soekanto (2012:242) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada masyarakat. Menurut Rasyid (2000) dalam Nurman (2015:56) mengemukakan bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Pemerintah yang bertindak sebagai mana seorang pelayan yang melayani konsumennya dalam hal ini masyarakatnya haruslah dengan tulus dan ikhlas.
2. Pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam otonomi daerah sekarang ini memiliki

interaksi dengan masyarakat sudah lebih dekat, di mana pemerintah sekarang haruslah lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam sebuah manajemen, baik dalam manajemen yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembangunan (*development*), sebagai penyelenggara pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam melakukan sebuah pembangunan, pemerintah haruslah mempertimbangkan beberapa hal yang paling signifikan guna pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat dan untuk kepentingan banyak orang. Pembangunan sangatlah perlu dalam sebuah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada intinya tugas pemerintah tersebut di atas saling memengaruhi satu sama lain. Peran pemerintah yang merupakan suatu keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta maupun organisasi pemerintah dengan segala bentuk tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.

Berdasarkan hal tersebut adapun menurut Siagian (2019:142) menyatakan peran pemerintah antara lain :

1. Peran Selaku Stabilisator
Peran pemerintah selaku stabilisator dalam rangka mewujudkan adanya keseimbangan sosial yang berorientasi pada kestabilan kondisi sosial di masyarakat.
2. Peran Selaku Inovator
Peran pemerintah selaku inovator sebagai pelaksana dalam hal melahirkan ide-ide yang kreatif dan baru dalam hal pembangunan.
3. Peran Selaku Modernisator
Peran pemerintah selaku modernisator berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk berfikir maju dan hidup modern.
4. Peran Selaku Pelopor
Peran pemerintah selaku pelopor artinya pemerintah harus mampu menjadi panutan utama (*role model*) untuk semua kalangan masyarakat.
5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri
Peran pemerintah selaku pelaksana sendiri artinya bahwa pemerintah diharapkan agar menjadi pelaksana yang mampu memainkan peran sebagai pelaksana sendiri.

Pemerintah Desa perlu memahami dan mampu menjalankan peran selaku stabilisator yang mampu menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat dalam menjalankan suatu program. Pemerintah Desa dituntut untuk dapat menstabilkan kondisi sosial di masyarakat, baik itu kondisi dibidang politik, ekonomi.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Desa selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani harus mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan peningkatan kesejahteraan dapat menstabilkan kondisi sosial di masyarakat. Yang salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan kelompok tani dengan menggali potensi yang dimiliki baik itu dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Dan harus seimbang dengan kegiatan yang optimal seperti kegiatan pembinaan dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan supaya kelompok masyarakat dapat berkembang ke arah kemajuan dan perubahan.

Desa Sukajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sekitar 63% mata pencaharian penduduk Desa Sukajaya sebagai petani dan sekitar 19% sebagai buruh tani. Peran Pemerintah Desa Sukajaya dalam pengembangan kelompok tani sangat penting untuk mendukung pengembangan kondisi desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Sukajaya tersebut memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga dengan kegiatan pengembangan kelompok tani dapat menciptakan kemajuan petani khususnya kelompok tani di Desa Sukajaya. Akan tetapi, kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa berakibat pada kelompok tani yang

tidak berkembang sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, Pemerintah Desa menjalankan perannya selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:9) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peran Pemerintah Desa Selaku Stabilisator dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran didasarkan pada dimensi Peran Selaku Stabilisator menurut Siagian (2019:142) dengan indikator diantaranya : Adanya program pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pengembangan kelompok tani, adanya pembinaan mengenai potensi pertanian dengan mendukung secara maksimal untuk kemajuan kelompok tani, adanya sosialisasi mengenai cara mengembangkan potensi pertanian kepada kelompok tani.

Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya melalui wawancara dan observasi. Data juga diambil dari informan dengan menggunakan *pusposive sampling*. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menstabilkan kondisi sosial dengan pengembangan kelompok tani melalui program peningkatan kesejahteraan, melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang bagaimana cara menggali potensi dan mengembangkan potensi di bidang pertanian.

Peran Pemerintah Desa selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani pada indikator adanya program pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pengembangan kelompok tani masih belum optimal, meskipun pemerintah desa telah melakukan pelaksanaan program pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok tani yang berupa pemberian benih tanaman hortikultura dan kegiatan SL (Sekolah Lapangan) bagi kelompok tani, namun pemerintah desa kurang adanya perencanaan dan

monitoring tentang program yang dilaksanakan sehingga hasil daripada program tersebut tidak diketahui dengan pasti oleh Pemerintah Desa. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan pengurus tekompok tani mengakibatkan kurang termonitoring pelaksanaan program pemerintah dan pemahaman tentang perencanaan program tersebut, selain itu kondisi iklim di Desa Sukajaya kurang cocok untuk ditanami tanaman hortikultura sehingga pengairan untuk lahan pertanian menjadi tidak stabil karena di Desa Sukajaya belum terdapat saluran irigasi untuk mengairan lahan pertanian. Pada dasarnya program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kelompok tani oleh Pemerintah Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun kelompok tani sebagai bentuk modal sosial dibidang pertanian terhadap pembangunan desa karena mencakup peningkatan kesejahteraan dan ekonomimasyarakat.

Peran Pemerintah Desa selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani pada indikator adanya pembinaan mengenai potensi pertanian dengan mendukung secara maksimal untuk kemajuan kelompok tani belum dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah Desa telah melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani, namun hanya melibatkan ketua kelompok tani saja, tidak mengikutsertakan anggota kelompok tani dalam pembinaan tersebut. Karena untuk mengumpulkan orang-orang

untuk mengikuti kegiatan pembinaan sangat sulit jika tidak ada uang duduk dari desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa hanya mengundang ketua kelompok tani dikarenakan terkendala biaya yang terbatas. Pada dasarnya, pembinaan mengenai potensi pertanian oleh Pemerintah Desa sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Kelompok tani membutuhkan pembinaan untuk dapat menambah semangat dan bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan kelompok tani.

Peran Pemerintah Desa selaku stabilisator dalam pengembangan kelompok tani pada indikator adanya sosialisasi mengenai cara mengembangkan potensi pertanian kepada kelompok tani belum dilaksanakan dengan optimal, dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang semakin jarang dilakukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Serta Pemerintah Desa kurang responsip mengenai kegiatan sosialisasi yang dibutuhkan oleh kelompok tani karena kebijakan yang kadang tidak konsekwen dalam pelaksanaan sosialisasi pengembangan potensi pertanian. Dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan potensi pertanian karena sangat diperlukan oleh kelompok tani dan kelompok tani bisa lebih paham dalam mengembangkan potensi pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Desa selaku Stabilisator dalam Pengembangan Kelompok Tani belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari 3 indikator bahwa Pemerintah Desa belum memainkan perannya selaku stabilisator dengan baik karena masih terdapat hambatan, dapat dilihat dari Pemerintah Desa kurang memonitoring dan koordinasi dalam hal perencanaan program, biaya yang terbatas, serta Pemerintah Desa yang kurang responsip terhadap kegiatan kelompok tani seperti pembinaan dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sondang, P. Siagian. (2019). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.